

MATRIKS RENCANA AKSI TAHUN 2025
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

Mengkonsep dan mengumpulkan data dukung Rencana Aksi

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN	RENCANA AKSI (adalah kegiatan yang selama ini menjadi permasalahan krusial dalam rangka pencapaian target output, dan sebagai upaya kualitas output sehingga berdampak bagi peningkatan kinerja organisasi)		TIMELINE RENAksi (TRIWULAN I / II / III / IV)
A	BAGIAN UMUM DAN TU							
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	Rp 495.826.000,00	1. Perencanaan dan Organisasi	Melakukan Penyusunan Rencana Strategis Kanwil Kementerian Hukum	III dan IV
							Melakukan Monitoring Capaian RO pada setiap DIPA di Kanwil Hukum setiap triwulan, termasuk kendala dan alternatif solusi apabila tidak tercapai target RO yang telah ditetapkan	I, II, III, dan IV
							Sinkronisasi Laporan target CRO dengan Penginputan CRO didalam Sakti	I, II, III, dan IV
							Melakukan Monitoring Alokasi Anggaran sesuai dengan besaran SBKU dan SBKK yang ditetapkan	I, II, III, dan IV
							Evaluasi dan Rekomendasi Kinerja Program dan Kegiatan Kantor Wilayah	I, II, III, dan IV
							Penyusunan SAKIP Tahun Berjalan dan Pembuatan Dokumen LKJIP (Tahun -1)	I dan II
							Penyusunan Manajemen Risiko (MR)	I dan III
							Penyusunan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)	I dan III
							Penyusunan RKA-K/L Kantor Wilayah (Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran)	II, III dan IV
							Analisis Kebutuhan Anggaran Kantor Wilayah Tahun + 2 (2027)	IV
					Rp 294.099.000,00	2. Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara (BMN)	II dan III
							Revisi anggaran pada halaman III DIPA terhadap pemenuhan target rencana penarikan dana (RPD)	I, II, III, dan IV
							Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran terhadap Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	I, II, III, dan IV

					Rp116.460.000,00	3. Pengelolaan BMN	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN)	II dan III
							Pengamanan, Pemindah Tangan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)	I dan II
					Rp282.605.000,00	4. Kepegawaian	Orientasi ASN Baru	II dan III
							Pembinaan Kepegawaian dan Bapperjakat	I, II, III, dan IV
							Bina Mental Pegawai	I, II, III, dan IV
							Penanganan Hukuman Disiplin Pegawai	I, II, III, dan IV
					Rp98.012.000,00	5. Tata Usaha dan Rumah Tangga	Administrasi dan Pengelolaan Pengadaan Barjas/UKPBJ	I, II, III, dan IV
							Pengelolaan Rumah Tangga Kantor Wilayah	I, II, III, dan IV
							Pengelolaan Kesehatan Pegawai	I, II, III, dan IV
					Rp10.215.000,00	6. Kearsipan	Pemusnahan Arsip	IV
							Peliputan dan Publikasi Kegiatan Pimpinan dan Kantor Wilayah	I, II, III dan IV
					Rp404.734.000,00	7.Humas	Koordinasi Keprotokoleran	II dan IV
							Pelaksanaan Keprotokoleran	II dan IV
							Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	I, II, III dan IV
					Rp180.120.000,00	8.Reformasi Birokrasi	Pembentukan Satker WBK/WBBM	I, II, III dan IV
							Pembangunan Budaya Anti Korupsi dan Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi	III
					Rp12.937.000,00	9.Teknologi Informasi	Evaluasi Penyelenggaraan SPBE Kantor Wilayah	IV
						10. dst		
B	DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBENTUKAN HUKUM							
1	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	Rp442.354.000,00		Melaksanakan koordinasi dengan instansi/stake holder terkait sebagai wujud kerja sama di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah untuk menyampaikan pentingnya pelaksanaan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	TW I, II, III, IV
		Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	15 Orang	Rp65.646.000,00		Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Peraturan perundang-undangan sebagai instansi pembina jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan serta melaksanakan kegiatan pendalaman materi untuk meningkatkan kapasitas pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan	TW I, II, III, IV
2	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	Rp69.800.000,00		Melakukan koordinasi dengan instansi/stake holder terkait dalam rangka perumusan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum serta melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pemahaman analisis dan evaluasi hukum di daerah	TW II dan III
							Melakukan koordinasi dengan instansi/stake holder terkait dalam	TW II, III, dan IV

	Wilayah	Perencanaan Peraturan Daerah	2. Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Rp	69.508.000,00	rangka inventarisasi, monitoring, dan evaluasi Propemperda serta melakukan kegiatan pelaksanaan penyusunan Prolegda/Naskah Akademik dalam rangka perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik	
3	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	Rp	60.277.000,00	Melaksanakan Pengelolaan dan Pembinaan JDIHN kepada seluruh Operator JDIHN dengan sasaran Biro Hukum Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	TW II
		Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	Rp	560.000.000,00	Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Pemberi Bantuan Hukum Tahun 2025; Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2025.	TW I, II, III, IV
			2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	Rp	96.030.000,00	Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Pemberi Bantuan Hukum Tahun 2025; Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2025.	TW I, II, III, IV
		Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	Rp	119.850.000,00	Koordinasi dan Sinergi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Peningkatan Pembinaan kepada Kelompok Keluarga Sadar Hukum, dan Pelaksanaan Lomba Kadarkum	TW II, III, IV
4	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	Rp	21.680.000,00	Analisis Evaluasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	TW II dan TW III
C	DIVISI PELAYANAN HUKUM							
1	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	Rp	255.159.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi / Diseminasi / Seminar / Webinar / Workshop / Pendalaman Materi Layanan AHU Lainnya (BO, perseroan perorangan, apostille, ParPol, PMPJ, Pengisian Data PMPJ) guna meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga mendorong peningkatan PNPB Bidang Pelayanan AHU Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan	TW II dan TW III

		Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	Rp	108.893.000,00		Dukungan Kesekretariatan, Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan kenotariatan pada MPW terhadap aduan yang diberikan oleh masyarakat	TW II ,TW III , dan TW IV
2	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	Rp	121.309.000,00		Melaksanakan Kegiatan Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah yang terdiri dari Pengawasan, Pendampingan Penanganan Aduan/Pelanggaran dan Evaluasi dan Pelaporan Penegakan Hukum KI di Wilayah	I, II, III dan IV
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	Rp	973.830.000,00		Melaksanaan Kegiatan Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	I, II, III dan IV
			Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	Rp	666.661.000,00		Melaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	I, II, III dan IV